



**REVOLUSI INDUSTRI 4.0
dan TANTANGAN
PENGEMBANGAN KETRAMPILAN**

P. Agung Pambudhi
APINDO Research Institute

19 Oktober 2018

©DPN APINDO 2018 www.apindo.or.id

APINDO



PEMBAHASAN

- **Teknologi & Sumber Daya Manusia**
- ***Skills Development* Negara Negara Kompetitor**
- **Rekomendasi *Skills Development* Indonesia**
- **Relasi Bipartit – Tripartit**

©DPN APINDO 2018 www.apindo.or.id



TEKNOLOGI dan SUMBER DAYA MANUSIA



Slide 3

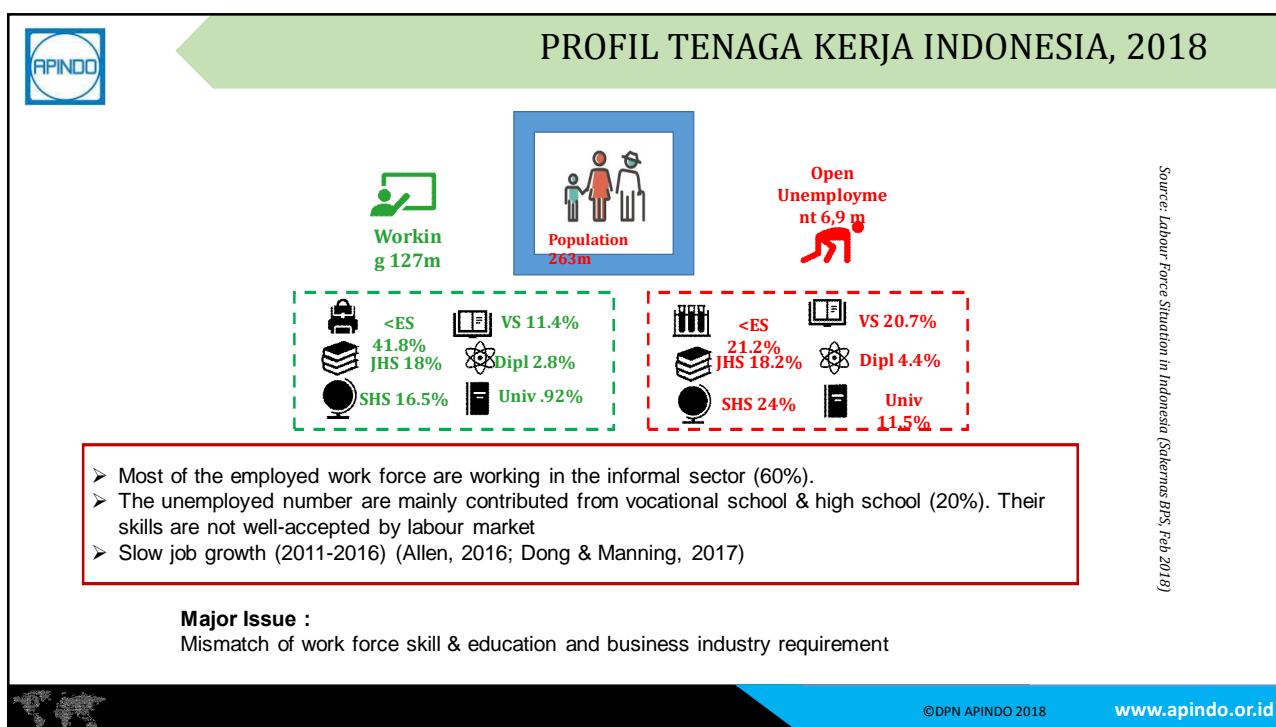
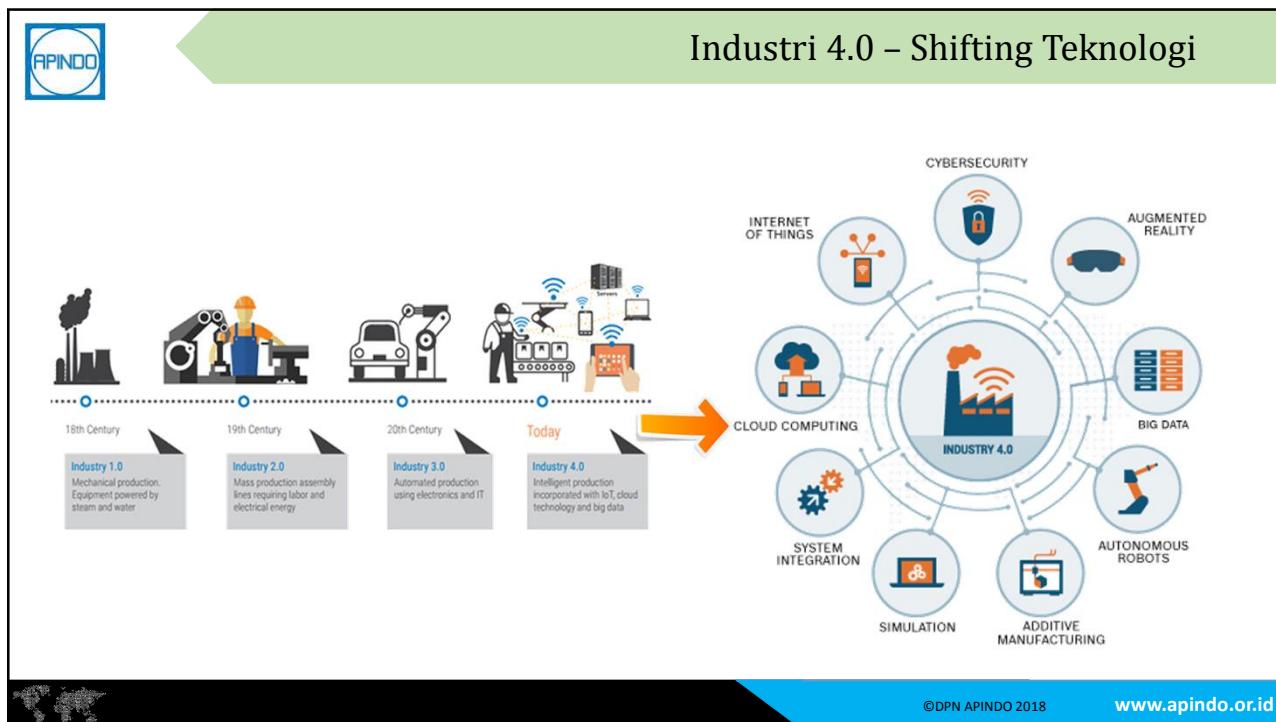


Industri 4.0

Definisi Industri 4.0 menurut Kementerian Perindustrian Indonesia:

“Industri 4.0 mengacu pada peningkatan otomatisasi, *machine-to-machine* dan *komunikasi human-to-machine*, *artificial intelligence*, serta pengembangan teknologi berkelanjutan.”







Tantangan Pengembangan Ketrampilan

- Tantangan Industri 4.0: penyesuaian kemajuan Teknologi dengan Pengembangan Keterampilan SDM
- Industri skala Menengah & Besar memiliki kebutuhan yang lebih mendesak terhadap percepatan program industri 4.0 dibandingkan industri skala Kecil.
- Kompetensi SDM Pekerja Indonesia belum memenuhi kebutuhan industri.
- Peningkatan kompetensi (Pemagangan & *link and match* Vokasi) maupun Sekolah Kejuruan serta BLK belum mampu menyediakan SDM sesuai standar industri



©DPN APINDO 2018

www.apindo.or.id

Transformasi Pasar Tenaga Kerja Indonesia



Sumber: Grand Design Komite Nasional Vokasi Indonesia, 2018)



©DPN APINDO 2018

www.apindo.or.id

Skills Development

Negara-Negara Kompetitor

Slide 9



Program Skills Development di Cina

Technical and Vocational Education Training (TVET)

Memodifikasi kursus TVET agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing industri

Kurikulum dikembangkan bersama oleh pemerintah dan industri.

Melakukan penggabungan struktur manajemen antara sekolah kejuruan dan industri

Industri memiliki andil pada proses manajemen sekolah kejuruan.

Industri diwajibkan untuk:

- ❖ Memberikan pelatihan kepada peserta kursus di tempat kerja.
- ❖ Memberikan pelatihan untuk para instruktur agar pengetahuan dan keterampilan dapat selalu diperbarui

1000 Talent Programme

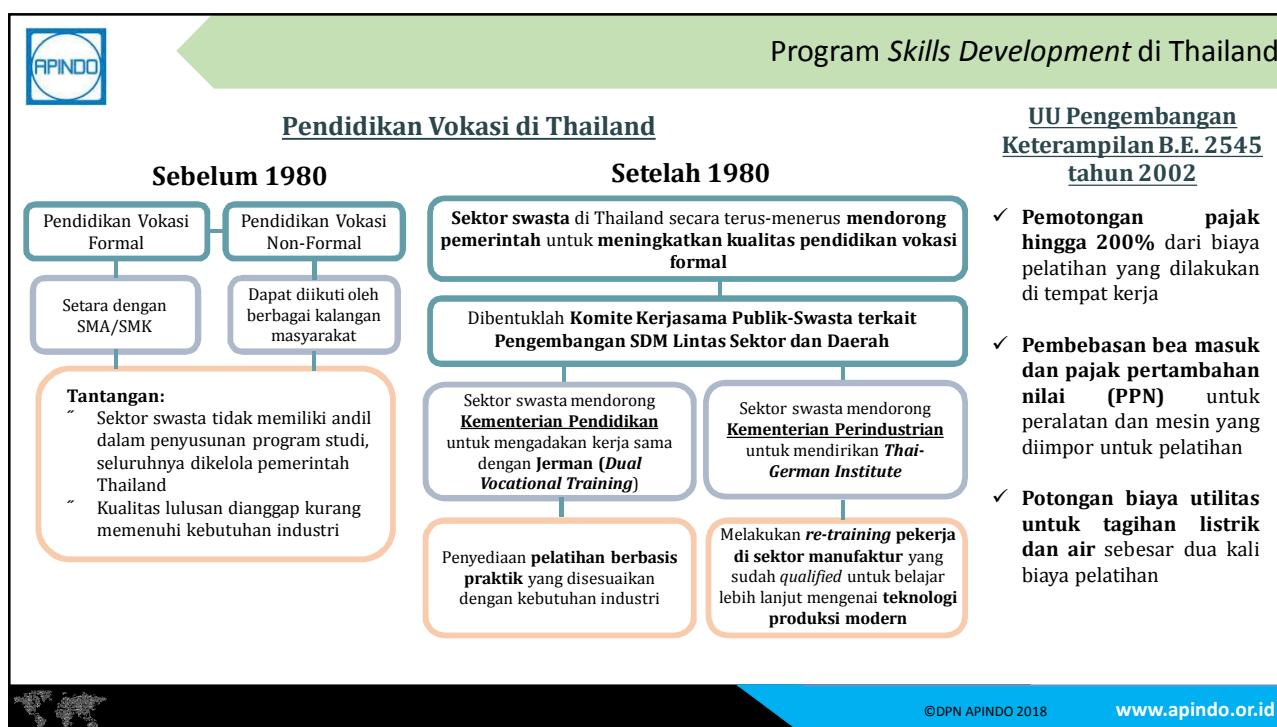
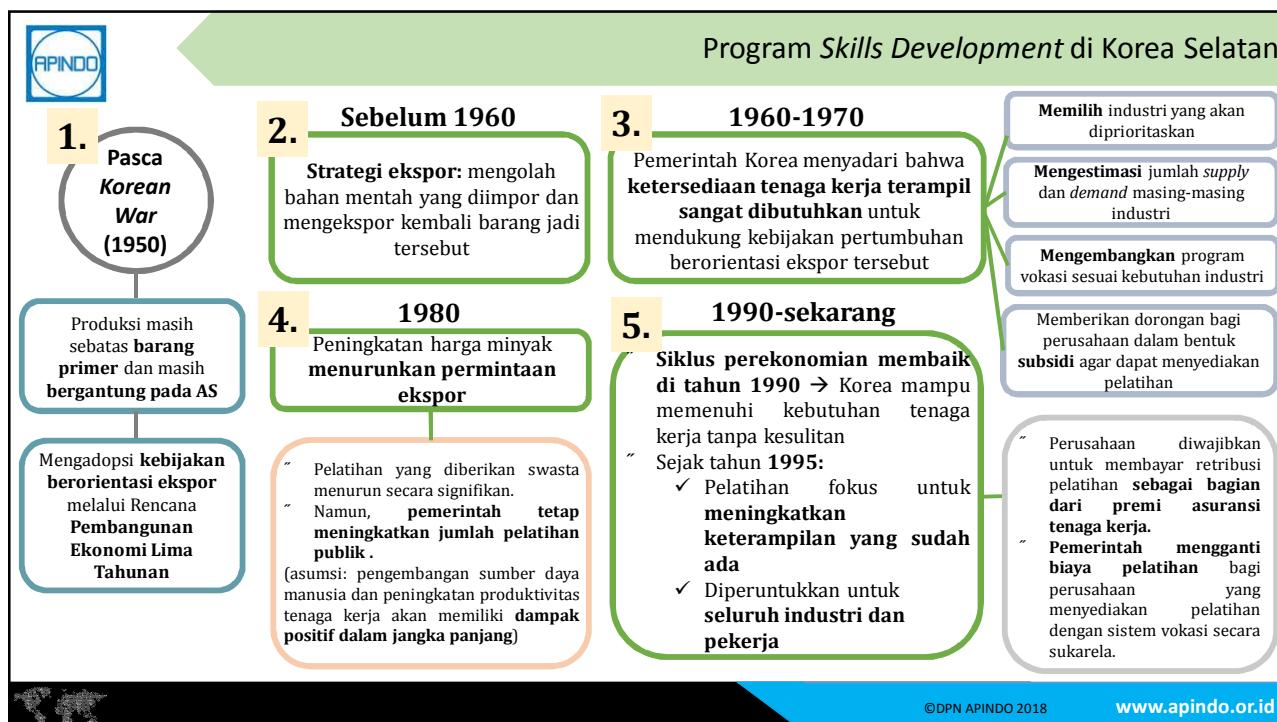
Ditujukan untuk para individu bertalenta, baik dari etnis Cina maupun non-etnis Cina dari mancanegara agar dapat kembali bekerja di perusahaan lokal

Diharapkan dapat menghasilkan **penelitian-penelitian inovatif** yang dapat meningkatkan daya saing industri manufaktur Cina

Melalui program ini, **pemerintah Cina memberikan:**

- ✓ **Dana bantuan** dalam bentuk penghargaan sebesar kurang lebih 2 miliar rupiah (1 juta RMB)
- ✓ **Akses pendanaan penelitian** yang mencapai 10 miliar rupiah (5 juta RMB)
- ✓ Berbagai manfaat tambahan: **tempat tinggal, dana pendidikan, dan kesehatan.**







Program Skills Development di Vietnam

Technical and Vocational Education Training (TVET)

	Primary Vocational Training	Secondary Vocational Training	Vocational College
Partisipan	Youths, unskilled workers	Lulusan SMA & SMP	Lulusan SMA & Secondary Vocational Training
Jangka Waktu	3 bulan – 1 tahun	1-2 tahun hingga 3-4 tahun	1-2 tahun hingga 2-3 tahun
Sertifikasi	Sertifikat Pelatihan	Professional/Vocational Secondary Education Diploma	College Diploma

Sumber: Law on Vocational Training in Vietnam (2006)

Kerja sama TVET dengan Investor Negara Lain

The Vietnam-Singapore Technical Training Center (VSTTC)

- Menyediakan pelatihan selama 6 bulan (1.100 jam) di lima bidang: 1) Perawatan listrik; 2) Perawatan mekanik; 3) Permesinan; 4) Elektronik; 5) Mekatronik
- Setelah bimbingan pemerintah Singapura selesai di tahun 2005, VSTTC kemudian bergabung dengan *Binh Duong Technical School* dan berubah menjadi Vietnam-Singapore Technical School di tahun 2006.

Hanoi Industrial College-Japan International Cooperation Agency Project

- Tujuan: meningkatkan jumlah teknisi dan insinyur yang mampu bekerja di sektor manufaktur
- Proyek ini menyediakan: 1) Kursus dan pelatihan teknik bagi siswa HIC; dan 2) Kursus jangka pendek bagi pekerja di Vietnam
- JICA menyediakan hibah peralatan sebesar 3,11 juta USD, biaya administrasi (0,83 juta USD), dan 39 orang experts dari Jepang

The Vietnam-Germany Center

- Tujuan: meningkatkan kualitas pelatihan dan kurikulum di Vietnam
- Menyediakan pelatihan bagi: 1) siswa reguler di Universitas Ho Chi Minh; 2) teknisi dan insinyur dari perusahaan dan sekolah lain; dan 3) profesional
- Pemerintah Jerman memberikan dana bantuan sebesar 8 juta USD untuk 8 tahun yang dipakai untuk membeli peralatan *training* dan mendatangkan instruktur dari Jerman

©DPN APINDO 2018

www.apindo.or.id



Tabel Perbandingan Program Skills Development di Negara Lain

No	Indikator	Cina	Korea Selatan	Thailand	Vietnam
1.	Kompetensi/ Standar	<p>China's Vocational Qualification & Certification: National Cross-occupations system (diatur oleh Menaker) & Industrial Cross-occupations system (Diatur oleh Kemenperin).</p> <p>China's Occupational Classification & Standards: Keterampilan industri umum, spesifik, dan inti (<i>specialized</i>).</p>	<p>National Competency Standard (NCS):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus untuk ± 276 pekerjaan di 20 sektor industri: agrikultur & kehutanan, tekstil, kimia, mesin, elektronik, lingkungan, jasa keuangan, jasa kesehatan, kebudayaan, pariwisata, dll (mencakup industri prioritas); - Terdiri dari 1-7 level standar performa (rendah ke tinggi). 	<p>National Qualifications Framework (NQF):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibagi berdasarkan komponen dan tingkat kualifikasi; mekanisme <i>link and match</i> dan <i>learning outcomes</i> per level. - Beberapa lembaga yang mengeluarkan standar: Kementerian, <i>Thai Professional Qualification Institute (TPQI)</i>; <i>Industries & Professional Associations</i> 	<p>National Occupational Skill Standards (NOSS):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saat ini sudah terdapat 122 standar untuk 122 pekerjaan, khususnya di bidang agrikultur, konstruksi dan transportasi - Sebanyak 400 standar pekerjaan ditargetkan di tahun 2020 <p>National Qualification Framework (NQF): Standar disesuaikan dgn ASEAN & Eropa (terdiri dari 8 level, masih berbentuk <i>draft</i>).</p>
2.	Pelatihan & Program SD Lain	<ul style="list-style-type: none"> - TVET yang disesuaikan dengan kebutuhan industri (industri turut mengembangkan kurikulum vokasi) - <i>Employment Training Center & Private Training Center</i> (bagi youths, migrant & unemployed workers) - <i>Enterprised-sponsored Training 1000 Talents Programme</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - TVET & Politeknik: fokus pada keterampilan mekanik, elektronik, perbaikan automobile, dan ICT - Penyediaan <i>labor market information system</i> - Kerja sama dengan negara lain untuk membangun <i>Vocational Training Center</i> (Laos & Guatemala). 	<ul style="list-style-type: none"> - TVET: Formal (setara dengan SMA/SMK) dan Non-Formal (dapat diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat) - Kerja sama dengan Jerman untuk membangun <i>Dual Vocational Training & Thai-German Institute</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - TVET: Primary Vocational Training (Youths, Unskilled Workers); Secondary Vocational Training (Lulusan SMP dan SMA); Vocational College (Lulusan Secondary Vocational Training dan SMA) - Kerja sama dengan negara lain untuk membangun <i>Vocational Training Center</i> (Singapura, Jepang, dan Jerman)
3.	Insentif Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - TVET: insentif fiskal untuk industri yang menyediakan pelatihan serta grants/loans bagi siswa yang berpartisipasi di TVET. - <i>1000 Talents Programme:</i> Dana bantuan per awardee (2 miliar rupiah); akses pendanaan penelitian; tempat tinggal dll. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan iuran pelatihan sebagai bagian dari premi asuransi tenaga kerja yang wajib dibayar perusahaan. - Mengganti biaya pelatihan bagi perusahaan yang menyediakan pelatihan dengan sistem vokasi secara sukarela. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemotongan pajak hingga 200% dari biaya pelatihan - Pembebasan PPN untuk peralatan dan mesin yang diimpor untuk pelatihan - Potongan biaya utilitas untuk tagihan listrik dan air sebesar dua kali biaya pelatihan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan pajak korporasi bagi perusahaan yang mengadakan pelatihan (sebesar 10%); serta 50% bagi perusahaan yang mengadakan pelatihan di daerah terpencil - Pembebasan pajak (ekspor, impor & value added) bagi barang keperluan pelatihan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri.



©DPN APINDO 2018

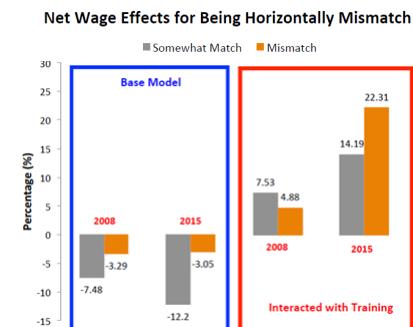
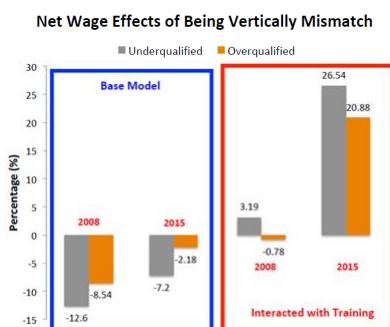
www.apindo.or.id

Rekomendasi Skills Development Indonesia

Slide 15



Job Mismatch & Pelatihan



Lembaga Demografi FEB UI (2018) menemukan bahwa keberadaan **pelatihan dapat mengurangi efek wage penalty** (ketidaksesuaian upah) pada pekerja yang mengalami **mismatch** pekerjaan baik secara **vertikal** (berdasarkan masa tempuh pendidikan) maupun **horizontal** (berdasarkan kesesuaian bidang).





Lessons learned dari Negara Kompetitor

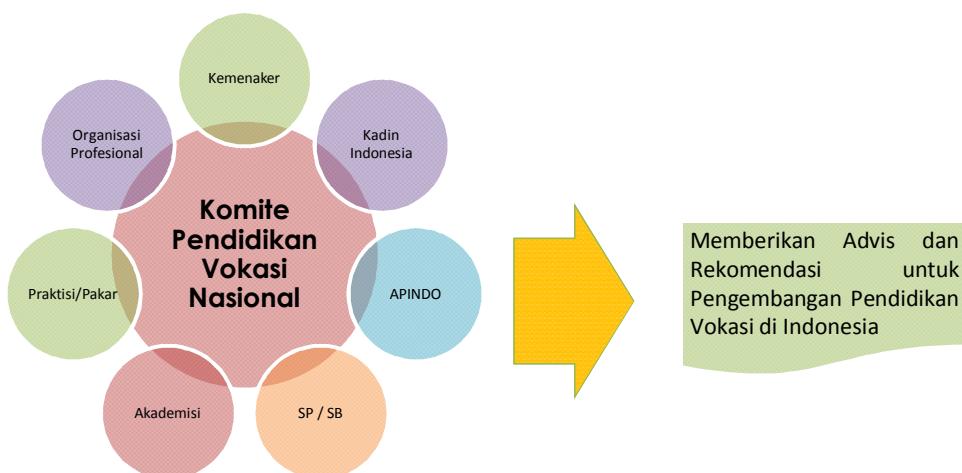
- ❖ Peningkatan kelengkapan dan kualitas standar kompetensi nasional perlu diselaraskan dengan pengembangan industri prioritas (contoh: Korea Selatan dan Vietnam).
- ❖ Tidak hanya koordinasi antar pemerintah-swasta yang diperlukan, namun keterlibatan swasta dalam penyusunan kurikulum pelatihan vokasi juga penting untuk diimplementasikan.
- ❖ Diperlukan kerjasama dengan negara lain yang bersifat konsisten dan berkelanjutan dalam mengembangkan pelatihan vokasi nasional. (contoh: Vietnam dengan Jerman dan Jepang).
- ❖ Hampir semua negara yang dipelajari telah menerapkan insentif pelatihan bagi swasta, baik dalam bentuk *tax deduction* maupun insentif pelatihan langsung. Insentif ini dianggap menjadi salah satu motivasi utama bagi industri dan swasta untuk menyediakan pelatihan mandiri.



©DPN APINDO 2018

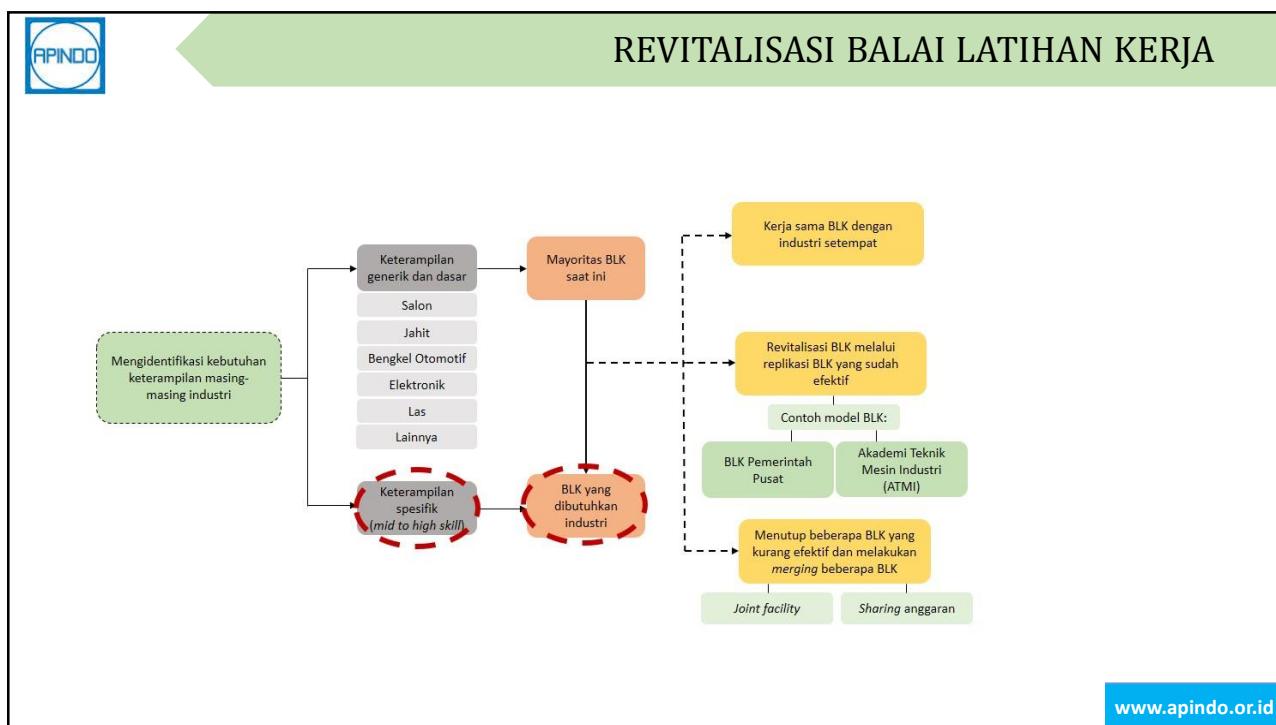
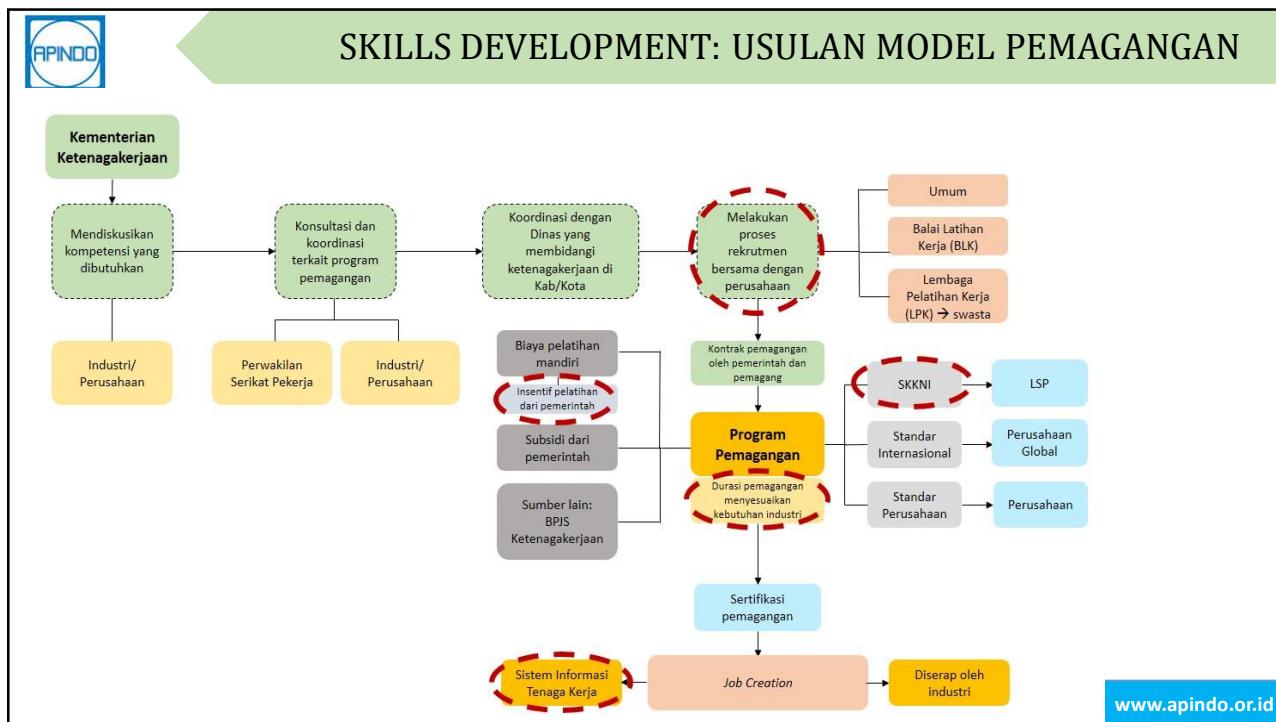
www.apindo.or.id

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI



©DPN APINDO 2018

www.apindo.or.id





Pembiayaan Skills Development

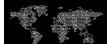
Skills Development Pekerja belum memiliki sumber pendanaan secara fundamental & berkelanjutan, maka perlu dipikirkan kemungkinan sumber pendanaan dari:

“ Dana BPJS Ketenagakerjaan

Sebelumnya telah dilakukan pembahasan mengenai skema pendanaan *Unemployment Benefit / Insurance (UI)*. Pendanaan *Skills Development Pekerja* juga dapat dilakukan dengan metode serupa, dan dunia usaha tidak keberatan dengan perencanaan skema *Skills Development Pekerja* tersebut asalkan dana nya bersumber dari dana pengelolaan *long-term* BPJS Ketenagakerjaan.

“ Dana Skills Development Pekerja Dikelola Pemerintah

Pengelolaan dana *Skills Development Pekerja* tidak dilakukan di perusahaan / dunia usaha, namun ditanggung / dikelola oleh Pemerintah. Seperti halnya pengelolaan UI, dunia usaha ikut mengkontribusikan dana kepada Pemerintah dan Kementerian terkait berperan dalam teknis pelaksanaan / pengelolaan *Skills Development Pekerja*.



©DPN APINDO 2018

www.apindo.or.id

Relasi Pengusaha dengan Pekerja



Slide 22



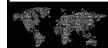
RELASI BIPARTIT & TRIPARTIT

ACTION PLAN IndustriALL

1. Build Union Power
2. Confront Global Capital
3. Defend Workers Rights
4. Fight Precarious Work
5. Create Sustainable Industrial Environment

Pandangan APINDO

- ✓ *International Framework Agreements (IFAs)* didasari konteks EU dengan mayoritas perusahaan EU → apakah sesuai dengan konteks Indonesia ?
- ✓ IFAs lebih terasa *top-down approach* dengan penetrasi melalui MNC yang dilaksanakan tidak dalam skema dialog sosial nasional, oleh karenanya tidak melibatkan Organisasi Pengusaha dan Pekerja Nasional
- ✓ Bipartit/Tripartit lebih baik menggunakan *platform ILO* sebagai kesepakatan global



©DPN APINDO 2018

www.apindo.or.id

REVITALISASI SERIKAT BURUH/PEKERJA

- Fokus Baru Gerakan Buruh: Skills Development
- Social Partnerships
- Basis Pengetahuan, bukan Gerakan Masa

GOV - MGT - TU Partnership

GOV - MGT - TU Partnership

Be knowledgeable

- ” employment-related government policies & initiatives
- ” Industry transformation
- ” Corporate and HR initiatives

Be Skillful

- ” positive and resilient
- ” Open minded
- ” Lifelong learning
- ” negotiation and mediation
- ” leadership
- ” Productivity enhancement

Be Involved

- ” active in social dialogue
- ” government initiatives on workers up skilling and reskilling initiatives
- ” Active in bipartite institutions



©DPN APINDO 2018

www.apindo.or.id

